

Analisis Kajian Metodik Didaktik Pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar

Aan Widiyono

PGSD, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

aan.widiyono@unisnu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa metodik didaktik pembelajaran PPKn di sekolah dasar. Selain itu, hasil yang dikaji dalam penelitian ini adalah terkait ruang lingkup PPKn di sekolah dasar. Metode penelitian menggunakan studi literatur. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa PPKn berkembang sesuai dengan arah perubahan kurikulum dari tahun 1962 sampai dengan kurikulum merdeka dengan istilah yang berbeda. Selain itu, muatan PPKn tentunya berubah sesuai dengan tujuan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah. Muatan materi PPKn menjadi kendala bagi guru karena masih bersifat abstrak dan proses pembelajaran masih belum mengedepankan *student centre*. Untuk yang terakhir adalah PPKn dapat diterapkan dalam berbagai model pembelajaran salah satunya adalah *group investigation* dengan hasil yang lebih optimal.

Kata Kunci: Kajian PPKn, Metodik Didaktik, Sekolah Dasar

PENDAHULUAN

Berpijak secara yuridis formal Kurikulum 2013 pada UU Sisdiknas no 20 tahun 2003, namun penerapannya didasarkan pada PP no 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP no 19 tahun 2005 tentang SNP. Perubahan kurikulum ini mengakibatkan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berubah nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) (Yani, 2019). Nomenklatur yang berubah didasarkan penyempurnaan yang berproses dalam lima tahun terakhir, seperti: (1) untuk substansialnya, PKn lebih kental unsurnyapada bidang ketatanegaraan, untuk itu muatan nilai dan moral Pancasila belum optimal dalam penekanan secara proporsional; (2) berdasarkan metodologi, adanya kecenderungan dengan mengutamakan aktifitas sikap (afektif) dan pengetahuan (kognitif), sedangkan ranah keterampilan (psikomotorik) belum berkembang optimal (koheren).

Melalui ruang lingkup Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa, UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, NKRI, sebagai kesepakatan final bentuk Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan dan keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Santoso et al., 2015). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SD sangat penting bagi pembentukan kepribadian warga negara supaya dapat melaksanakan hak-hak dan kewajiban menjadi warga negara Indonesia yang terampil, cerdas, dan berkarakter yang sesuai Pancasila dan UUD 1945 (Magdalena et al., 2020a)

Menurut Undang-Undang. Sistem Pendidikan Nasional. PPKn merupakan mata pelajaran wajib bagi semua siswa di jalur

pendidikan formal. PPKn menjadi penentu watak bagi warganegara supaya taat hukum sehingga seimbang antara hak dan kewajiban, (Rahayu, 2007). Supaya siswa lebih demokratis dan bertanggung jawab, PPKn memiliki tujuan supaya siswa berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari (Yani, 2019). Minat belajar terhadap PPKn seyogyanya harus ditingkatkan supaya dapat berhasil dalam proses pembelajaran. Untuk itu, minat hadir akan selalu hadir secara sadar dalam diri siswa (Magdalena et al., 2020b)

Disetiap manapun manusia ada, ia memiliki hak dan kewajiban, khususnya disekolah (Dewi, 2020). Hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia harus sama supaya tercipta kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang (Abdulkarim, 2007). Melalui PPKn, siswa diharapkan dapat memahami apa saja hak dan kewajiban secara individu dan sosial. Disamping itu, PPKn dituntut supaya dapat menjadikan warga negara dengan memiliki komitmen kuat dan konsisten dalam mempertahankan NKTI supaya dapat menjaga harkat dan martabat sebuah bangsa (Madiong et al., 2018). Melalui berbagai kajian tersebut, maka dalam penelitian dibahas tentang ruang lingkup kajian PPKn di SD yang disertai Motodik dan Didaktiknya.

METODOLOGI

Penelitian ini diperoleh berdasarkan penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui sumber data primer dan skunder. Sumber data primer lebih menekankan pada aturan perundang-undangan yang telah terbit dan masih berlaku sampai tahun 2022. Sumber data skunder mengacu pada literatur pendukung seperti: buku, jurnal, laporan penelitian, kepustakaan lain yang bereputasi dan kredibel. Studi literatur menjadi teknik pengumpulan data utama. Teknik ini digunakan karena sumber data primer penelitian adalah jurnal atau artikel ilmiah.

Studi literatur merupakan teknik pengambilan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berstandar; dan dokumen pemerintah dan surat-surat lainnya. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan model interaktif (Miles & Huberman, 2009). Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, sehingga dihasilkan paparan bersifat deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep PPKn di Sekolah Dasar

Pada dasarnya pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang kondusif. Pendidikan di Indonesia bertujuan untuk memajukan nilai-nilai sikap dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai pedoman Pancasila. PPKn merupakan pendidikan yang mengingatkan pentingnya nilai, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, agar segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa serta tidak menyimpang jauh sehingga diterapkan sejak dini pada semua jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai di perguruan tinggi (Kurniawan, 2018).

PPKn merupakan bidang studi dengan sifat multifaset berdasarkan konteks lintas bidang keilmuan. Secara filsafat keilmuan PKn memiliki ontology pokok ilmu politik terkhusus pada konsep *political democracy* untuk aspek *duties and rights of citizen* (Chreshore:1886 dalam Banjarnahor, 2021)). Melalui ontology pokok kemudian dapat berkembang menjadi konsep *civics* secara harafiah adalah *civicus* yang berarti warga negara di zaman Yunani kuno. Berawal dari pengertian itulah kemudian berkembang dan secara akademis diakui sebagai embrionya *civic education*. Secara epistemologis, PKn sebagai suatu bidang keilmuan merupakan pengembangan dari salah satu dari lima tradisi *social studies* yakni *citizenship*

transmission (Barr et al., 1978). Tradisi *social studies* mengalami perkembangan pesat sehingga kini telah menjadi suatu *body of knowledge* yang memiliki paradigma sistemik berisi tiga domain *citizenship education* yaitu: domain akademis, kurikuler, dan sosial kultural. PKn secara pragmatik memiliki visi *socio-pedagogis* untuk mendidik warganegara yang demokratis dalam konteks yang lebih luas, antara lain mencakup konteks pendidikan formal dan non-formal (Kurniawan, 2018).

PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting untuk diajarkan pada semua jenjang sekolah terutama jenjang Sekolah Dasar. Ruminati, (2007) menunjukkan bahwa pelajaran PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat dan biasanya merupakan mata pelajaran afektif. Selain itu, PKn adalah upaya sadar untuk membekali peserta didik dengan keterampilan dasar bela negara dan memahami hubungan antara warga negara dan negara, dengan tujuan menjadi warga negara yang dapat dipercaya oleh rakyat dan negara. (Somantri, 2001). Pada konsep pendidikan kewarganegaraan dalam menghadapi era globalisasi hendaknya mengembangkan *civic competence* (kompetensi kewarganegaraan). Aspek-aspek *civic competence* tersebut meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*).

Menurut beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa Pancasila dan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran khusus yang mengajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik, yaitu. warga negara yang cerdas, berkualitas, berwatak kuat, dan mampu menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang. berdasarkan hukum dan peraturan.

B. Latar Belakang PPKn

Pengembangan masyarakat demokratis melalui PPKn memerlukan tugas dan model pembelajaran khusus. Perkembangan kewarganegaraan secara formal dimulai dengan lahirnya *Civics* dalam kurikulum SMA tahun 1962. Dalam kurikulum 1968 dan 1969, istilah *Civics* digunakan secara bergantian. Misalnya, dalam kurikulum SD (1968) digunakan istilah *Civics* sebagai nama mata pelajaran yang meliputi sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan kewarganegaraan. Kurikulum SMA tahun 1968 menggunakan istilah kewarganegaraan yang mencakup sejarah dan ketatanegaraan Indonesia, termasuk UDD 1945, sedangkan kurikulum kewarganegaraan tahun 1968 memuat materi khusus pendidikan tahun 1945 dan konstitusi Republik Indonesia (Budimansyah, 2010; Somantri, 2001).

Selain itu, Kurikulum 1975 mengubah konsep pendidikan kewarganegaraan menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP), yang memasukkan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Pemahaman dan Pengamalan Pancasila, atau P4. Perubahan ini sejalan dengan amanat pembinaan di bawah Ketetapan MPR II/MPR/1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib di SD, SMP, SMA, SPG dan SMK. Tema PMP ini terus berlanjut baik dalam waktu maupun isi hingga berlakunya Kurikulum 1984 yang pada hakekatnya merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 1975 (Budimansyah, 2010). Seiring dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menggariskan keberadaan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bahan pembelajaran kurikulum wajib untuk semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Kurikulum 1994 memperkenalkan pancasila dan kewarganegaraan atau civic.

Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 1994 menyusun materi pembelajarannya tidak berdasarkan rumusan butir-butir nilai P4, melainkan berdasarkan konsep nilai yang diambil dari P4 dan sumber-sumber resmi lainnya, disusun dengan menggunakan spiral yang meluas. (Budimansyah, 2010). Bersamaan dengan itu, sejak tahun 2004, kurikulum sekolah direformasi sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan perkembangan pesat ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS). Pembelajaran kurikulum (1994) membimbing siswa untuk penguasaan materi informasi. kemudian pengembangan kurikulum 2004 paradigma berbasis kompetensi meliputi pengembangan kurikulum dan sistem evaluasinya. Adanya ketentuan pendidikan kewarganegaraan dalam Undang-Undang Sisdiknas sebagai mata pelajaran wajib di tingkat SD, SMP, dan Perguruan Tinggi menunjukkan bahwa mata pelajaran ini menempati posisi yang strategis untuk mencapai tujuan pendidikan nasional di negeri ini. Arah pengembangannya harus difokuskan untuk menjadikan peserta didik sebagai manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam (Kurikulum 2013) berubah kembali menjadi PPKn dan masuk dalam Pendidikan Hukum Multikultural Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), PPKn adalah nama mata pelajaran wajib kurikulum pendidikan dasar dan menengah . dan mata pelajaran wajib kurikulum pendidikan tinggi (Pasal 37). Menurut Pasal 37 Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan adanya ketentuan UU No. 20 tahun 2003, kedudukan pendidikan kewarganegaraan menjadi landasan dalam pengembangan masyarakat multikultural

dalam sistem pendidikan Indonesia supaya menjadi semakin jelas dan mantap. Kondisi tersebut didasarkan pada teori bahwa PPKn merupakan salah satu ujung tombak pendidikan multikultural untuk membangun karakter warga negara multikultural yang menghargai identitas budaya masyarakat yang majemuk secara demokratis dan membentuk mozaik yang indah dalam satu semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* (Garcia, 1982; Quigley, 1998). Pada kurikulum merdeka, terdapat istilah bahwa mata pelajaran PPKn berubah nama menjadi mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Namun pada muatannya masih sama yakni Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini tertuang pada perubahan pasal 40 ayat 4 tentang SNP yang tertuang dalam PP No 4 tahun 2022.

C. Hakikat PPKn

Hakikat PPKn adalah membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan dasar tentang hubungan warga negara Indonesia dengan negara dan warga negara lainnya. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian dari ilmu yang memiliki landasan filosofis ontologi, epistemologi, dan aksiologi. (Karsidi, 2018). Berdasarkan kajian ontologis memiliki, PPKn merupakan objek material, yaitu nilai, moral dan karakter. Melalui perspektif epistemologis, PPKn dikaji dan dibahas melalui pendekatan akademik dan ilmiah, dengan penekanan pada olah hati, olah karsa, olah rasa dan olah pikir yang inklusif, integratif, dan holistik. Secara aksiologis, keberadaan dan urgensi PPKn merupakan sarana pendidikan nilai, moral dan karakter, sehingga menjadi sarana perubahan pendidikan karakter untuk mengembangkan rasa kebangsaan dan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, PPKn di sekolah dasar dapat menjadi program pendidikan berbasis nilai pancasila yang mengembangkan dan

mendukung nilai-nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa, yang diharapkan dapat membentuk jati diri misalnya. perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran pengembangan diri yang beragam baik dari segi agama, sosial, budaya, bahasa, umur dan suku bangsa, menitikberatkan pada pendidikan warga negara yang dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, berkualitas, dan berjiwa pancasila. dan UUD 1945.

Paradigma pembelajaran PPKn dapat diimplementasikan sebagai amanat untuk mengembangkan pendidikan demokrasi psikopedagogis dan sosio-dagogis, yang tugasnya mengembangkan tiga ciri utama warga negara yang demokratis, kecerdasan sipil, tanggung jawab sipil, dan partisipasi sipil. Mata pelajaran PPKn bertujuan untuk membentuk siswa menjadi warga negara yang demokratis dengan kecerdasan intelektual, emosional dan sosial. Tugas *citizen science* dengan paradigma barunya untuk mewujudkan masyarakat demokratis harus dikembangkan lebih jauh ke arah pengembangan kecerdasan mental, emosional dan sosial. Paradigma baru ilmu warga dengan demikian secara konseptual dan programatik multidimensi (Kurniawan, 2018). Selain itu, dalam kompetensi PPKn dalam kurikulum 2013 yaitu: 1) *Civic knowledge* (pengetahuan warga negara), masuk kedalam KI 3 pengetahuan, yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai dimensi PPKn yang semuanya melebur kedalam rumusan KD; 2) *Civic skill* (keterampilan warga negara) masuk kedalam KI 4 keterampilan; 3) *Civic Disposition* (sikap warga negara) masuk kedalam KI 1 dan KI 2 sikap spiritual dan sosial.

D. Tujuan PPKn

PPKn di sekolah dasar dan menengah sangat penting. Karena mata pelajaran ini

mengandung materi akhlak dan budi pekerti. Tentunya materi ini dapat membantu siswa untuk berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu sebagai calon guru kita harus memiliki sikap yang baik agar siswa dapat mencontoh dan meneladaninya. Menurut Depdiknas, (2006) tujuan pembelajaran PPKn adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut:

1. Berpikir kritis, rasional dan kreatif saat menjawab pertanyaan kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia sehingga dapat hidup bersama dengan bangsa lain.
4. Berinteraksi dengan negara lain secara langsung menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan peraturan dunia.

Tujuan mata pelajaran PPKn dalam kurikulum 2013 adalah mengembangkan keimanan dan akhlak mulia yang berpedoman pada falsafah hidup bangsa Indonesia, atau pancasila, sehingga dapat berfungsi sebagai warga negara yang efektif dan bertanggung jawab. Secara umum pembahasannya mencakup empat pilar kewarganegaraan yang saling berkaitan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. (SNP Kemdikbud RI dalam Rahmayani, 2016). Tujuan pembelajaran PPKn sangat penting dalam kehidupan nyata saat ini, ketika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang teknologi informasi sangat maju, dan era globalisasi semakin cepat, sehingga siswa peduli terhadap perkembangannya. bisa untuk perawat tantangan mahasiswa menghadapi

satu persatu rintangan yang penuh dengan gejolak masyarakat dunia. Dengan pengembangan tersebut diharapkan guru mampu membekali siswa dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan untuk menyikapi kehidupan yang terus berubah dari waktu ke waktu. Perubahan ini terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa menghentikannya

E. Fungsi PPKn

Mata pelajaran PPKn adalah mata pelajaran yang membentuk sifat atau karakter peserta didik agar menjadi manusia yang lebih baik. Mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran yang dapat mengantarkan siswa pada akhlak dan perilaku yang lebih baik. Sebagai calon guru, kita harus bisa mengajar dan melatih siswa kita agar mahir. Serta siswa yang berperilaku baik dan memiliki moral yang positif. Misi pendidikan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah membentuk peserta didik menjadi warga negara yang dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya serta berbakti kepada bangsa dan negara Indonesia dengan memandang dirinya sebagai warga negara yang cerdas, profesional dan berkarakter sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945(Kurniawan, 2018).

Suplemen pengembangan SD PKn dapat berupa model, strategi, metode dan pendekatan untuk melaksanakan Pembelajaran PKn SD yang inovatif. Pengembangan suplemen SD PKn ini dapat didasarkan pada prinsip Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM). Prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat memudahkan pengadopsian IPS, khususnya dalam menilai ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik secara bersamaan, khususnya bagi siswa yang belajar membaca dan menulis di kelas bawah. Di kelas atas, kreativitas dalam belajar semakin meningkat. Namun konsekuensinya adalah guru sebagai

motivator dan pendidik harus kreatif, proaktif dan memiliki ketertarikan terhadap siswa. Tanpa ini, pembelajaran politik yang diinginkan tidak akan tercapai secara optimal. Menurut Mubarakah dalam Magdalena et al., (2020a) Fungsi pembelajaran PPKn adalah:

1. Mari bantu generasi muda untuk memahami cita-cita atau tujuan negara
2. Kemampuan untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam memecahkan masalah pribadi, masyarakat dan pemerintah
3. Mampu menghargai cita-cita bangsa dan mengambil keputusan yang bijak
4. Sarana untuk mendidik warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia, dengan cara berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pentingnya peran dan fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam pendidikan sepanjang hayat dan pemberdayaan peserta didik melalui keteladanan, kemauan dan pengembangan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran, melalui visi, sikap, kecakapan hidup dan kehidupan demokrasi pendidikan kewarganegaraan harus diperhatikan. dikembangkan untuk membangun kehidupan yang demokratis.

F. Materi PPKn dalam Kurikulum KTSP, Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka

Berdasarkan Permendiknas No. 22/2006, cakupan mata kuliah pada pendidikan dasar dan menengah biasanya mencakup aspek-aspek sebagai berikut: 1) persatuan dan kesatuan bangsa; 2) standar, hukum dan peraturan; 3) hak asasi manusia; 4) kebutuhan warga negara; 5) konstitusi negara; 6) kekuasaan dan politik; 7) Pancasila; dan 8) globalisasi. Selain itu,

dalam kurikulum 2013, kewarganegaraan dan kewargaan akan ditata ulang sebagai berikut: 1) Pancasila sebagai dasar pandangan hidup berbangsa dan bernegara; 2) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 3) Bhinneka Tunggal Ika sebagai perwujudan kebhinekaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam satu kesatuan dan kebhinekaan yang utuh; dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara Indonesia (Balitbang Puskurbuk Kemdikbud, 2012).

Sebagai bagian dari kurikulum mandiri, Permendikbud No. 7 Tahun 2022 menyebutkan bahwa terdapat perbedaan isi dan ruang lingkup antara pendidikan pancasila dengan pendidikan dasar berbasis sekolah dalam kewarganegaraan. Pembinaan pancasila lebih terkait dengan: a) Pancasila sebagai dasar negara dan Garuda Pancasila sebagai lambang negara, perintah dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap tatanan Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari; b) Menghargai keberagaman, toleransi, hidup rukun dan gotong royong di rumah, sekolah dan masyarakat, sesuai prinsip saling menghargai dan menghargai Bhineka Tunggal Ika; dan c) identitas diri, keragaman identitas dan hak orang lain dalam kerangka persatuan bangsa. Sementara itu, pendidikan kewarganegaraan meliputi: a) norma dan aturan yang berlaku dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat yang terwujud dan mendominasi dalam kehidupan sehari-hari, serta hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, anggota sekolah, dan bagian dari masyarakat; b) Diskusi tentang kehidupan sehari-hari dalam keluarga, sekolah dan masyarakat untuk mencapai kesamaan pemahaman dan berbagai ungkapan pendapat; c) Ciri-ciri lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai bagian dari wilayah negara Republik Indonesia; dan d) pentingnya menjaga kerukunan sebagai modal

dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta bentuk sikap dan perilaku untuk menjaga kerukunan dan kekompakan dalam keluarga, sekolah dan masyarakat.

G. Permasalahan dan Solusi Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar

Berikut ini merupakan beberapa permasalahan & solusi Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar menurut (Hendrizal, 2019). Permasalahannya Mengapa selama ini PKn cenderung kurang di minati siswa, diantaranya:

1. Pertama, kurikulum yang terlalu berat. Konten kurikulum PKn untuk tingkat SD terlalu tinggi.
2. Kurangnya kemampuan guru dalam menangkap kata kunci dalam KI dan KD.
3. Guru mengajar berdasarkan buku teks (*textbook centre*). Buku teks selama ini menjadi pegangan wajib.
4. Praktik mengajar PKn selama ini lebih banyak berlangsung dengan pendekatan konvensional.
5. Pembelajaran tidak kontekstual.
6. Evaluasi cenderung mengarah pada aspek kognitif.

Melalui permasalahan tersebut, tentunya guru dapat menentukan solusi yang kongkrit seperti: 1) kurikulum disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa SD; 2) menangkap esensi atau kata kunci dalam KI dan KD secara benar; 3) mengajar harus punya persiapan RPP yang baik; 4) mengajar dengan pendekatan konstruktivisme. Melaksanakan pendekatan konstruktivisme akan banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplor potensi dirinya; 5) belajar berdasarkan realita; dan 6) evaluasi bersifat total (kognitif, afektif dan psikomotor) (Hendrizal, 2019).

H. Jenis-Jenis Model Pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar

Menurut Joyce et al., (2003) bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang digunakan untuk membentuk kurikulum dan pembelajaran jangka panjang. Merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau diluar kelas. Untuk model pembelajaran PPKn di SD dapat diterapkan dalam berbagai model (Hendracipta, 2021), sebagai berikut:

1. Model Pembelajaran *Demonstration*

Model pembelajaran demonstrasion adalah model mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada siswa.

2. Model *Direct Intruction*

Direct intruction atau model pembelajaran langsung dapat didefinisikan sebagai model pembelajaran dimana guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada siswa, pembelajaran berorientasi pada tujuan dan distrukturkan oleh guru. Menurut Killen dalam Depdiknas (2010:23), pembelajaran langsung merujuk pada berbagai tehnik pembelajaran ekspositori (pemindahan pengetahuan dari guru kepada murid secara langsung, misalnya melalui ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab) yang melibatkan seluruh kelas.

3. Model *Inquiry Based Learning*

Model pembelajaran *Inquiry Based Learning* merupakan salah satu model yang dapat mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Model pembelajaran *inquiry based learning* merupakan kegiatan pembelajaran berbasis pendidikan dimana siswa mencari sendiri jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Selain itu, menurut Bevevino et al., (1999) pembelajaran *inquiry based learning* merupakan suatu model pembelajaran yang berpusat kepada siswa, kelompok-kelompok siswa dihadapkan pada suatu persoalan atau mencari jawaban ata pertanyaan-pertanyaan melalui suatu

prosedur yang telah direncanakan secara jelas (Lubis, 2020).

4. Model Kooperatif tipe *Jigsaw*

Menurut Slavin, (1983, 1989, 2011) pembelajaran kooperatif sebagai lingkungan belajar dimana peserta didik bekerjasama dalam suatu kelompok kecil yang kemampuannya berbeda-beda untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik. Pada model kooperatif *Jigsaw* dapat digunakan apabila materi pembelajaran berbentuk tertulis. Dalam model pembelajaran *Jigsaw*, siswa belajar dalam tim yang heterogen, siswa tersebut diberikan tugas untuk membaca beberapa bab atau unit diberikan "lembar ahli" yang dibagi atas topik-topik yang berbeda dan yang harus menjadi fokus perhatian anggota tim saat mereka membaca. Setelah semua siswa selesai membaca siswa-siswa yang dari tim yang memiliki topik yang sama bertemu dalam "kelompok ahli" untuk mendiskusikan topik mereka. Setelah itu para ahli kembali ke timnya secara bergantian untuk mengajari teman satu timnya mengenai topik mereka.

5. Model Kooperatif tipe *Group Investigation* (GI)

Pembelajaran tipe ini bukan pembelajaran yang berpusat pada guru, disamping itu tipe ini memerlukan pengajaran keterampilan komunikasi dan proses kelompok yang baik pada siswa. Sedangkan menurut (Joyce et al., 2003) menjelaskan *Group Investigation* merupakan tipe pembelajaran kelompok yang memiliki konsep dasar memberikan dan memunculkan sebuah permasalahan untuk merangsang siswa bereaksi dan melakukan pemecahan masalah tersebut. Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa *Group Investigation* adalah tipe pembelajaran yang kegiatan pembelajarannya dilakukan bersama-sama secara berkelompok dan struktur dengan baik, dimana siswa ikut berperan dalam

pembelajaran yang dilaksanakan guna memecahkan masalah.

I. Pembelajaran PKn melalui Model Kooperatif Tipe *Group Investigation* (GI)

1. Konsep Kooperatif tipe *Group Investigation* (GI)

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Sinergi ditingkatkan dalam bentuk kerjasama akan meningkatkan motivasi yang jauh lebih besar dari pada dalam bentuk lingkungan kompetitif individual. Menurut Joyce et al., (2003) terdapat 7 asumsi yang mendasari pengembangan pembelajaran kooperatif (*cooperative learning*) adalah sebagai berikut

1. Kelompok-kelompok sosial integrative memiliki pengaruh yang lebih besar dari pada kelompok yang dibentuk secara berpasangan.
2. Anggota-anggota kelompok kooperatif dapat saling belajar satu sama lain.
3. Interaksi antar anggota, akan menghasilkan aspek kognitif semisal kompleksitas sosial, menciptakan sebuah aktivitas intelektual yang dapat mengembangkan pembelajaran ketika dibenturkan pada pembelajaran tunggal.
4. Kerjasama meningkatkan perasaan positif terhadap satu sama lain, menghilangkan pengasingan, dan penyendirian, membangun sebuah hubungan, memberikan sebuah pandangan positif mengenai orang lain.
5. Kerjasama meningkatkan penghargaan diri, tidak hanya melalui pembelajaran yang terus berkembang, namun juga

- melalui perasaan dihormati dan dihargai oleh orang lain dalam sebuah lingkungan.
- Siswa mengalami dan menjalani tugas serta merasa harus bekerjasama dapat meningkatkan kapasitasnya untuk bekerjasama secara produktif.
 - Siswa, termasuk juga anak-anak, bisa belajar dari beberapa latihan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bekerjasama.

Model ini pertama kali dikembangkan oleh Sharan and Sharan pada tahun 1976. Model ini dirancang untuk membimbing siswa dalam memperjelas masalah, menelusuri berbagai perspektif dalam masalah tersebut, mengkaji bersama untuk menguasai informasi, gagasan, skill yang secara simultan model ini juga mengembangkan kompetensi sosial mereka (Joyce et al., 2003). Secara umum perencanaan pengorganisasian kelas adalah kelompok yang dibentuk oleh siswa itu sendiri dengan beranggotakan 2-6 orang, tiap kelompok bebas memilih subtopik dari keseluruhan unit materi (pokok bahasan) yang akan diajarkan, dan kemudian membuat atau menghasilkan laporan kelompok (Rusman, 2016). Untuk itu, model pembelajaran GI dapat diartikan sebagai model pembelajaran yang digunakan dalam pemecahan masalah yang berbasis penelitian dan penyelidikan yang dilakukan secara berkelompok.

2. Langkah-langkah Model Kooperatif tipe GI dalam PKn

Model pembelajaran GI dapat diterapkan dalam pembelajaran PKn (Putera & Qalbi, 2020). Dengan menerapkan model GI diharapkan dapat mengubah pembelajaran dari yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa sehingga siswa pun akan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran serta dapat memperoleh pemahaman dalam jangka waktu yang panjang, yang juga akan berimbas pada peningkatan hasil belajar siswa (Wicaksono et

al., 2017). Untuk langkah-langkah *Group Investigation*: 1) Mengidentifikasi topik dan membuat kelompok; 2) Merencanakan tugas yang akan dipelajari; 3) Melaksanakan investigasi; 4) Menyiapkan laporan akhir; 5) Mempresentasikan laporan akhir; dan 6) Evaluasi. Pemilihan topik. Untuk rancangan sintaks model GI dapat diperhatikan pada table berikut ini:

Fase	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa
Memusatkan perhatian siswa.	Fokus pada materi dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan tujuan pembelajaran	Menjawab pertanyaan guru dan fokus pikiran pada satu pokok materi/bahasan yang ingin di bahas hari ini.
Identifikasi topik dan pembagian kelompok	Guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk memberikan kontribusi apa yang akan diselidiki siswa Kelompok dibentuk berdasarkan heterogenitas	Memberikan masukan terhadap topik yang diteliti dan diinvestigasi sesuai materi yang akan dipelajari Membentuk kelompok
Perencanaan tugas	Menyiapkan dan menata sumber belajar sebagai sarana siswa mengembangkan ide supaya dapat berinvestigasi secara optimal	Kelompok akan membagi subtopik kepada seluruh anggota. Membuat perencanaan masalah yang diteliti
Melaksanakan Penyelidikan	Mefasilitasi, membimbing serta mengawasi siswa yang	Siswa berfantasi mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi informasi

Fase	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa
	sedang mengembangkan ide dan berinvestigasi agar setiap kelompok dapat bekerja optimal	membuat kesimpulan dan mengaplikasi bagian mereka ke dalam pengetahuan baru dalam mencapai sebuah masalah kelompok
Mem-presen-tasikan tugas akhir	Memberikan reinforcement kelompok yang penampilannya baik dan memberikan motivasi pada kelompok yang kurang baik Memberikan penegasan terhadap pokok bahasan dari setiap kelompok	Siswa mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok lain memberikan tanggapan
Evaluasi pembelajaran	Membantu siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dipelajari Bersama siswa menyimpulkan pembelajaran Mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan dengan menggunakan tes hasil belajar	Menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari Menjawab teori yang diberikan guru

3. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran *Group Investigation*

Kelebihan: 1) Dirancang untuk membantu terjadinya pembagian tanggung jawab ketika siswa mengikuti pembelajaran; 2) Beorientasi menuju pembentukan siswa menjadi manusia sosial; 3) Dapat mengembangkan kreatifitas siswa, baik secara individu maupun kelompok. Shoimin, (2014) mendeskripsikan beberapa kelebihan dari pembelajaran GI, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Pribadi
 - 1) dalam proses belajarnya dapat bekerja secara bebas
 - 2) memberi semangat untuk berinisiatif, kreatif, dan aktif
 - 3) rasa percaya diri dapat lebih meningkat
 - 4) dapat belajar untuk memecahkan, menangani suatu masalah
 - 5) mengembangkan antusiasme dan rasa pada fisika
- b. Secara Sosial
 - 1) meningkatkan belajar bekerja sama
 - 2) belajar berkomunikasi baik dengan teman sendiri maupun guru
 - 3) belajar berkomunikasi yang baik secara sistematis
 - 4) belajar menghargai pendapat orang lain
 - 5) meningkatkan partisipasi dalam membuat suatu keputusan
- c. Secara Akademis
 - 1) siswa terlatih untuk mempertanggungjawabkan jawaban yang diberikan
 - 2) bekerja secara sistematis
 - 3) mengembangkan dan melatih keterampilan fisika dalam berbagai bidang
 - 4) merencanakan dan mengorganisasikan pekerjaannya
 - 5) mengecek kebenaran jawaban yang mereka buat

- 6) Selalu berfikir tentang cara atau strategi yang digunakan sehingga didapat suatu kesimpulan yang berlaku umum.

Kekurangan: 1) Sedikitnya materi yang tersampaikan pada satu kali pertemuan; 2) Sulitnya memberikan penilaian secara personal; 3) Tidak semua topik cocok dengan model pembelajaran; 4) Diskusi kelompok biasanya berjalan kurang efektif; 5) Siswa yang tidak tuntas memahami materi prasyarat akan mengalami kesulitan saat menggunakan model ini (Putra et al., 2018).

4. Penerapan

Model pembelajaran *Group Investigation* dapat diterapkan pada materi globalisasi, dimana pendidik membagi siswanya menjadi beberapa kelompok. Siswa diajak untuk mengamati dampak dari globalisasi terhadap kehidupan sehari-hari, sehingga muncul ide-ide mereka tentang dampak globalisasi. Kemudian siswa menganalisis dan menyimpulkan dampak positif dan negatif dari globalisasi sehingga mereka dapat menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi. Setelah itu, kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran khusus mengajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter dan mampu menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang berdasarkan peraturan perundangundangan. Latar belakang PPKn dapat dipahami sebagai mata pelajaran yang selalu berkembang dari masa ke masa sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia, karena PPKn mempelajari tentang: 1) *Civic knowledge*; 2) *Civic skill*; 3) *Civic Disposition*. Tujuan pembelajaran PPKn diharapkan mampu meningkatkan: 1) berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu

Kewarganegaraan; 2) berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 3) berkembang secara positif dan demokratis; dan 4) berinteraksi dengan penguasaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Fungsi PPKn tentunya sebagai sarana untuk membentuk siswa menjadi warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya, berkomitmen setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan diri sebagai warga negara yang cerdas.

Materi PPKn dalam Kurikulum KTSP, Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka memiliki acuan yang berbeda yang tertuang dalam SNP dalam peraturan Kemendikbud. Terdapat berbagai permasalahan dalam kemampuan memahami materi dalam PPKn, diantaranya: kurikulum PPKn yang terlalu berat, pembelajaran berdasarkan *textbook centre*, praktik mengajar berlangsung konvensional dan tidak kontekstual, serta evaluasi cenderung mengarah pada aspek kognitif. Sedangkan dalam solusinya dalam pembelajaran PPKn dapat mengadopsi berbagai model-model pembelajaran sebagai berikut: 1) Model Pembelajaran *Demonstration*; 2) Model *Direct Instruction*; 3) Model *Inquiry Based Learning*; 4) Model Kooperatif tipe *Jigsaw*; dan 5) Model Kooperatif tipe *Group Investigation* (GI).

KESIMPULAN

PKn merupakan usaha sadar yang dilakukan untuk memberikan kemampuan dasar kepada siswa tentang bela negara dan memahami hubungan antara warga negara dengan negara dengan tujuan agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Untuk latar belakang PPKn sendiri kemunculannya dimulai dari kurikulum SMA tahun 1962 yang sampai saat ini istilahnya sering berubah sesuai dengan

kebutuhan tantangan zaman saat ini. Khususnya kurikulum merdeka saat ini, istilahnya tidak PPKn namun berubah menjadi mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Namun pada muatannya masih sama yakni Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Hakikat PPKn merupakan bagian ilmu pengetahuan yang memiliki landasan filsafat baik ontologi, epistemologi maupun aksiologi. Tujuan PPKn sendiri lebih menekankan pada kemampuan siswa yang memiliki keimanan dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila agar dapat berperan sebagai warga negara yang efektif dan bertanggung jawab.

Untuk materi PPKn begitu padat dan kompleks sehingga terkadang mengalami berbagai permasalahan dari segi konten materi dan aktivitas proses pembelajaran, salah satu permasalahan umum yang terjadi diantaranya: 1) kurikulum yang terlalu berat, konten kurikulum PPKn untuk tingkat SD terlalu tinggi; 2) guru fokus pada proses mengajar yang lebih *textbook centre*; 3) pendekatan lebih bersifat konvensional dan pembelajaran belum kontekstual. Selain itu, dalam pemecahan masalah tersebut, guru dapat menggunakan model pembelajaran *group investigation* sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran yang mana dapat digunakan dalam pemecahan masalah yang berbasis penelitian dan penyelidikan yang dilakukan secara berkelompok

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarim, A. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis*. PT Grafindo Media Pratama.
- Banjarnahor, D. N. (2021). Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam Meningkatkan Sikap Demokratis Siswa. *PENDIPA Journal of Science Education*, 5(3), 316–321.
- Barr, R., Barth, J. L., & Shermis, S. S. (1978). *The Nature of the Social Studies: with Forew. by Edgar B. Wesley*. ETC Publ.
- Bevevino, M. M., Dengel, J., & Adams, K. (1999). Constructivist theory in the classroom internalizing: Concepts through inquiry learning. *The Clearing House*, 72(5), 275–278.
- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*. Widya Aksa Press.
- Depdiknas. (2006). *Permendiknas No 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi*. Depdiknas.
- Dewi, N. P. C. P. (2020). *Buku ajar mata pelajaran sekolah dasar pkn dan pancasila*. Nilacakra.
- Garcia, R. L. (1982). Teaching in a pluralistic society: concepts, models. *Strategies*, 126.
- Hendracipta, N. (2021). *Model Model Pembelajaran SD*. Multikreasi Press.
- Hendrizal. (2019). Permasalahan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sd Dan Solusinya. *Jurnal PPKn & Hukum*, 14(2), 54–62.
- Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2003). *Models of teaching*.
- Karsidi. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, M. I. (2018). *Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan di SD*. UMSIDA Press.
- Lubis, M. A. (2020). *Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan:(PPKN) DI SD/MI: Peluang Dan Tantangan Di Era Industri 4.0*. Prenada Media.
- Madiong, B., Mustapa, Z., & Chakti, A. G. R. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education. *Makasar: Celebes Media Perkasa*.
- Magdalena, I., Haq, A. S., & Ramdhan, F. (2020a). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar Negeri Bojong 3 Pinang. *Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 2(3), 418–430.
- Magdalena, I., Haq, A. S., & Ramdhan, F. (2020b). Pembelajaran Pendidikan

- Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar Negeri Bojong 3 Pinang. *Bintang*, 2(3), 418–430.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Analisis Data Kualitatif. Translated by TR Rohidi*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Putera, R. F., & Qalbi, Z. (2020). Penggunaan Model GI (Group Investigation) pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan*. <https://doi.org/10.31258/Jp.11.20-32>.
- Putra, P. G. N., Margunayasa, I. G., & Wibawa, I. M. C. (2018). Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation (GI) Berbasis Lesson Study Terhadap Penguasaan Konsep IPA. *Jurnal Pedagogi Dan Pembelajaran*, 1(2), 84–93.
- Quigley, C. N. (1998). Civic education: Recent history, current status, and the future. *Alb. L. Rev.*, 62, 1425.
- Rahayu, M. (2007). *Pendidikan kewarganegaraan*. Grasindo.
- Rahmayani, R. R. (2016). Implementasi Manajemen Pembelajaran Ppkn Kurikulum 2013. *Manajer Pendidikan*, 10(2).
- Ruminati. (2007). *Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan SD*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Rusman. (2016). *Model-model Pembelajaran*. Rajawali Press.
- Santoso, G., Al Muchtar, S., & Abdulkarim, A. (2015). Analysis SWOT Civic Education curriculum for senior high school year 1975-2013. *JURNAL CIVICUS*, 15(1).
- Shoimin, A. (2014). *Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013*. Ar-ruz Media.
- Slavin, R. E. (1983). When does cooperative learning increase student achievement? *Psychological Bulletin*, 94(3), 429.
- Slavin, R. E. (1989). Research on cooperative learning: An international perspective. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 33(4), 231–243.
- Slavin, R. E. (2011). Instruction based on cooperative learning. *Handbook of Research on Learning and Instruction*, 358–374.
- Somantri, M. N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan PKn*. Remaja Rosda Karya dan PPS UPI.
- Wicaksono, B., Sagita, L., & Nugroho, W. (2017). Model Pembelajaran Group Investigation (Gi) Dan Think Pair Share (Tps) Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis. *AKSIOMA: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 8(2), 1–8.
- Yani, A. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan. *Universitas Esa Unggul*, 85–86. <https://doi.org/10.31219/osf.io/8xbm2>